

# Kurikulum Merdeka: Inovasi, Implementasi, dan Masa Depan

MUHAMMAD FAUZINUDIN FAIZ

Pengurus PP GP Ansor, Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



**K**URIKULUM Merdeka yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merupakan terobosan besar dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa sehingga menjanjikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan.

Fokus pada pembelajaran berbasis kompetensi, kontekstualisasi materi, dan pengembangan karakter melalui nilai-nilai Pancasila menjadikan Kurikulum Merdeka sebagai langkah strategis untuk menciptakan generasi muda yang adaptif dan inovatif.

## Apresiasi terhadap Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka adalah inovasi signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia. Dengan prinsip kebebasan kepada pendidik untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan potensi siswa. Kurikulum ini mengutamakan pembelajaran berbasis kompetensi, siswa didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif.

Penekanan pada pembelajaran kontekstual adalah salah satu fitur unggulan Kurikulum Merdeka. Materi pelajaran dihubungkan dengan situasi nyata dan relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa, sehingga membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna serta membantu siswa memahami dan menerapkan pengetahuan lebih efektif.

Selain itu, Kurikulum Merdeka memperkenalkan konsep "Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila" yang berfokus pada pengembangan karakter siswa sesuai nilai-nilai Pancasila. Berbagai proyek dan kegiatan dirancang untuk membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai seperti gotong royong, integritas, dan kemandirian.

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga didorong melalui Kurikulum Merdeka. Teknologi memperluas akses informasi bagi siswa dan memungkinkan pengajaran yang lebih interaktif dan adaptif. Program seperti "Sekolah Penggerak" dan "Kampus Merdeka" menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pengembangan potensi siswa secara optimal.

## Program Unggulan

Kurikulum Merdeka mencakup beberapa program unggulan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu program tersebut adalah Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Program ini bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa melalui kegiatan interaktif dan kontekstual. Di kampus, ini dapat diterapkan melalui mata kuliah atau kegiatan ekstrakurikuler yang menggabungkan proyek berbasis komunitas. Contoh konkret bisa berupa program pelayanan masyarakat yang berfokus pada pengembangan desa atau proyek lingkungan yang melibatkan partisipasi mahasiswa secara aktif.

Program Sekolah Penggerak bertujuan mendorong peningkatan kualitas sekolah-sekolah di Indonesia. Di lingkungan kampus, konsep ini dapat diterapkan melalui pelatihan bagi dosen dan staf akademik untuk mengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel dan relevan. Misalnya, dosen dapat mengikuti workshop dan pelatihan untuk meningkatkan metode pengajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Kampus Merdeka memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah lintas disiplin dan mengikuti program magang di industri. Ini sangat relevan di kampus, di mana mahasiswa dapat merancang program studi mereka sendiri yang mencakup berbagai disiplin ilmu dan mendapatkan pengalaman praktis di industri terkait. Misalnya, seorang mahasiswa teknik dapat mengambil mata kuliah dari fakultas bisnis dan mengikuti program magang di perusahaan teknologi. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri juga diperkuat, memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan wawasan langsung dari praktik profesional dan memperkaya pengalaman belajar mereka.

Ketiga program unggulan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kompetensi akademik dan keterampilan abad 21 pada mahasiswa seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Dengan pendekatan holistik dan kontekstual, program-program ini tidak hanya membangun karakter yang kuat tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Implementasi program-program ini di kampus menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman, menjadikan pendidikan Indonesia lebih inklusif dan berkualitas.

## Rekomendasi Pengembangan Kurikulum

Untuk memperkuat implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat pendidikan tinggi, diperlukan langkah-langkah strategis yang mendasar dan sistematis. Peningkatan pelatihan dan pendampingan bagi dosen sangat penting. Dosen perlu diberikan pelatihan berkelanjutan tentang metode pembelajaran berbasis proyek, strategi diferensiasi pembelajaran, dan penggunaan teknologi pendidikan.

Pengembangan infrastruktur digital di kampus juga sangat penting. Pemerintah harus memastikan akses

yang merata terhadap perangkat teknologi dan internet, termasuk di daerah terpencil. Ini mencakup peningkatan fasilitas teknologi di ruang kelas, pengembangan laboratorium komputer, dan pembentukan pusat sumber belajar berbasis teknologi yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika. Selain itu, pengembangan platform *e-learning* yang ramah pengguna dan kaya akan sumber belajar harus diutamakan.

Evaluasi berkala dan adaptasi berbasis umpan balik merupakan komponen vital dalam menjaga relevansi dan efektivitas Kurikulum Merdeka. Evaluasi harus melibatkan dosen, mahasiswa, dan staf administrasi untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai implementasi kurikulum. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), dan analisis data akademik. Berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan adaptasi dan perbaikan terus-menerus agar selalu selaras dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Penguatan kolaborasi dengan industri dan komunitas lokal juga dapat memperkuat implementasi Kurikulum Merdeka di kampus. Melalui kemitraan ini, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman nyata yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sosial. Program magang, kunjungan industri, dan proyek komunitas dapat diintegrasikan dalam kurikulum untuk memperkuat keterampilan praktis dan karakter mahasiswa.

Pengembangan modul pembelajaran kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa perlu dikembangkan dan disebarluaskan. Modul ini harus mampu mengaitkan teori dengan praktik dan memotivasi mahasiswa untuk belajar melalui pendekatan yang menarik dan bermakna. Selain itu, modul pembelajaran harus mencerminkan keragaman budaya dan konteks lokal di Indonesia, sehingga mahasiswa dapat merasa lebih terhubung dengan materi yang dipelajari. ■

## NUANSA

### Penghormatan



Delima Natalia Napitupulu  
Wartawan Lampung Post

"APAKAH ada yang keberatan tentang vonis ini, silakan ajukan di sini atau bisa diajukan paling maksimal tiga hari setelah sidang ini," begitu kata Hakim Ketua Majelis Sidang Konstitusi tentang syarat capres. "Baik Yang Mulia, kami pikir-pikir dahulu," ucap penggugat konstitusi dalam sidang itu.

Hakim di Indonesia memang lazim disapa "Yang Mulia." Meski tanpa dasar aturan tertulis, pemberlakuan-

nya dikuatkan lewat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan. Hakim, harus ditempatkan dalam posisi tertinggi, dihormati, dan dianggap lebih "suci" ketimbang banyak peserta sidang lainnya.

Jika ditarik lebih ke asal, sebutan "mulia" pada hakim sebenarnya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan jabatan, apalagi personal. Panggilan "Yang Mulia" hanyalah sepenggal harapan. Sebab, dalam memimpin sebuah proses peradilan, pemegang palu putusan itu dicita-citakan mampu berlaku adil, tidak memihak, jujur, konsisten, dan bisa diandalkan.

Bayaran sebagai sebuah perwujudan kemuliaan itu, seorang hakim berkuasa untuk memutuskan siapa pun yang dianggap secara sengaja berlaku tidak sopan untuk dikategorikan sebagai tindakan penghinaan terhadap pengadilan, atau biasa disebut *contempt of court*. Tidak main-main, ganjarannya bisa 1,5 tahun penjara.

Kemuliaan memang barang mahal. Seorang manusia ditakdirkan untuk menghabiskan apa yang dia punya, dari mulai pikiran, nafsu, dan hak kemerdekaannya demi bisa melestarikan istilah mulia atau kemuliaan. Meskipun di masa keemasan Yunani, syarat untuk meraih kemuliaan cukup dilafalkan sederhana, yakni *bonum faciendum, malum vitandum* (menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan), tetapi faktanya, beda tafsir "kemuliaan" justru mampu menjadikan banyak nyawa manusia melayang.

Syarat kesopanan yang dibebankan pada orang lain demi menopang kemuliaan satu pihak ini pernah terakam sebagai "dosa terhadap filsafat". Aristoteles, yang pada akhirnya dicap sebagai pria bejat sebagai buntut dari sentimen anti-Makedonia, pernah bilang, "Saya tidak akan mengizinkan orang Athena durhaka dua kali kepada filsafat dengan mengatasnamakan kesopanan untuk kemuliaan."

Perkara kemuliaan, rupanya menorehkan perih setiap dia mengingat sang kakek guru, Socrates, yang mati diracun dalam dakwaan enggan mengakui dewa-dewi negara dan menyebarkan virus ketidaksopanan di kalangan muda.

Aristoteles pun kemudian mendefinisikan mulia dan kemuliaan sebagai aset kontrol alam pikiran. Bukan stempel yang tidak boleh dilunturkan dari dada seseorang hingga merengut kebebasan, kemerdekaan, dan jiwa manusia lainnya. Serampangnya, kemuliaan seperti iman. Bisa naik, turun, bahkan hilang, selaras dengan perilaku dan sikap si empunya. Begitu, kira-kira, Yang Mulia. ■

## Silakan tanggapi melalui:

Lampost.co atau Bedah Tajuk di Metro TV Lampung  
Setiap Selasa dan Jumat, pukul 13.30 WIB

# Mencerna Deflasi Keyakinan Konsumen

HARYO KUNCORO

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI Jakarta, anggota Focus Group Bidang Fiskal dan Keuangan Negara PP-ISEI



**D**ALAM dua bulan berturut-turut, perekonomian nasional mengalami deflasi. Badan Pusat Statistik mencatat deflasi pada Juni 2024 sebesar 0,08%, lebih dalam jika dibandingkan dengan Mei 2024 yang mencapai 0,03% secara bulanan. Bagi masyarakat awam, fenomena deflasi dipahami sebagai berita baik. Harga umum terus menunjukkan gejala penurunan.

Telaah mendalam atas komponen pembentukannya tampaknya juga masih sejalan. Harga komoditas pangan bergejolak (*volatile food*), misalnya, terjadi deflasi 0,98%. Padahal pada bulan sebelumnya masih mengalami inflasi 0,69%. Artinya, dengan pendapatan yang tetap, daya beli masyarakat sejatinya meningkat.

Di sisi lain, fenomena deflasi berurutan juga membersihkan kekhawatiran atas kondisi sebaliknya. Deflasi menjadi indikasi awal kemerosotan daya beli. Secara teoretis, ia ditunjukkan oleh pergeseran kurva permintaan agregat ke kiri. Dengan asumsi kurva penawaran agregat tidak berubah, harga umum turun yang dibaca sebagai deflasi.

Sampai di sini, satu fenomena ekonomi bisa menyodorkan penafsiran yang berbeda-beda. Perbedaan

penafsiran agaknya bermula dari alur logika yang tidak sama. Pengembangan logika atas dasar asumsi yang berlainan menghasilkan kesimpulan yang tidak sama plus implikasi kebijakan yang berbeda pula.

Penafsiran bahwa deflasi menaikkan daya beli masih bisa diterima. Logika yang dipakai ialah memosisikan daya beli sebagai akibat. Data di atas, toh sudah menunjukkan peningkatan daya beli terbatas pada komoditas pangan. Lagi pula tingkat deflasi umum dari level 0,03% ke 0,08% tampaknya belum signifikan mendongkrak daya beli.

Inflasi inti (*core inflation*) yang diyakini lebih merepresentasikan persistensi daya beli justru mengalami inflasi. Pada Juni 2024, inflasi inti mencapai 0,10% secara bulanan. Cerita yang sama juga berlaku pada harga yang diatur pemerintah (*administered price*) yang mengalami inflasi 0,12%.

Oleh karenanya, dugaan penurunan daya beli tampaknya lebih relevan. Porsi belanja untuk makanan, toh lebih kecil daripada pengeluaran untuk nonmakanan. Hal itu didukung pula oleh IKK (indeks keyakinan konsumen) terbitan Bank Indonesia (BI) yang pada Juni 2024 juga melanjutkan tren deflasi.

IKK per Juni bertengger di posisi 123,3, lebih rendah jika dibandingkan dengan 125,2 pada bulan sebelumnya. Bukan sebuah kebetulan semata jika indeks ekspektasi konsumen (IEK) selama periode yang sama juga menyusut. IEK tercatat sebesar 133,8 atau turun dari bulan sebelumnya yang tercatat di level 135,0.

Meski masih di level optimistis (kedua indeks lebih besar dari 100),

penurunan IKK dan IEK yang disertai dengan deflasi dalam dua bulan berturut-turut patut dicerna serius. Misalnya, pada Juli ada momen anak-anak masuk sekolah yang menandai tahun ajaran baru. Biasanya pada tahun ajaran baru masyarakat banyak pengeluaran untuk keperluan sekolah.

Demikian pula pola historis produksi beras dalam beberapa bulan ke depan akan mulai menurun. Perubahan iklim seperti ini mulai menggeser cuaca yang pada gilirannya juga berpotensi mendorong kembali kenaikan harga pangan bergejolak.

Lebih luas lagi, transmisi pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini bisa menyulut inflasi impor (*imported inflation*). Harga barang sekunder produk industri yang memiliki kandungan impor tinggi diyakini akan menanjak.

Alhasil, sehimpun tantangan di atas memaksa masyarakat berupaya mempertahankan daya belinya. BLT (bantuan langsung tunai) atau bansos (bantuan sosial) dari pemerintah bisa berfungsi sebagai bantalan bagi golongan masyarakat bawah, tetapi tampaknya belum terlalu nendang pada persoalan daya beli tadi.

Artinya, fenomena deflasi dan penurunan IKK/IEK berturut-turut selama dua bulan terakhir menunjukkan ikhtiar mandiri golongan masyarakat menengah/bawah dalam mempertahankan daya beli mereka. Menghemat pengeluaran ialah cara terbaik ketika menghadapi situasi ekonomi yang belum pasti.

Data IKK menunjukkan proporsi pembayaran cicilan/utang mencapai 9,6%. Angka itu turun dari po-

sisi bulan sebelumnya, yakni 10,3%. Proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (*saving to income ratio*) tercatat relatif stabil jika dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 16,5%.

Mengurangi pengeluaran yang kurang urgen lantas menyimpan pendapatannya memang tidak keliru. Namun, logika individual/mikro tersebut jika sudah masuk ranah kolektif/makro, persoalannya menjadi berbeda. Penghematan pengeluaran, jika terjadi secara massal, niscaya akan melemahkan gerak maju perekonomian.

Oleh karena itu, jika Juli mengalami deflasi lagi, kekhawatiran justru bisa meluas ke arah kinerja pertumbuhan ekonomi. Artinya, deflasi sejatinya bukan sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Pokok persoalannya ialah indikator di level mikro jarang dirujuk menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi makro.

Berangkat dari sini, mengompromikan antara dimensi mikro dan aspek makro tampaknya menjadi kunci pembuka dalam membangun kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Kebijakan makro yang berbasis pada mikro niscaya akan mereduksi efek samping yang semestinya tidak perlu terjadi.

Dalam konteks ini, masyarakat kelas atas yang memiliki daya beli tinggi perlu didorong dengan berbagai insentif agar tidak menunda belanjanya mereka. Belanja dari satu pelaku ekonomi akan menjadi penerimaan bagi pelaku ekonomi lain. Perputaran antara belanja-penerimaan itu secara makro akan memacu pertumbuhan ekonomi. ■

## PAK DE PAK HO



## POJOK

Vaksin polio selamatkan anak bangsa.  
Jangan sampai anak-anak cacat karena tidak vaksin.

Masyarakat makin terbuka pada keuangan digital.  
Makin terbuka juga celah kejahatan digital.